

TESIS

**RASIONALITAS ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT NELAYAN
KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Disusun dan diajukan oleh

IRWANSYAH MANSYUR

Nomor Pokok P4300216308

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **11 Januari 2019**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat

Dr. Gustiana A. Kambo, SIP., M.Si.

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,

Dr. A. M. Rusli, M.Si.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.



mmad, SIP., M.Si.

**RASIONALITAS ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT NELAYAN
KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
TAHUN 2014**

***RATIONALITY OF THE POLITICAL ORIENTATION OF THE MAJENE
REGENCY FISHERMAN COMMUNITY IN THE 2014 LEGISLATIVE
ELECTIONS***

TESIS

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Magister pada Program Studi Ilmu Politik**



IRWANSYAH MANSYUR

P4300216308

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

TAHUN 2019



TESIS

RASIONALITAS ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT NELAYAN
KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Disusun dan diajukan oleh

IRWANSYAH MANSYUR

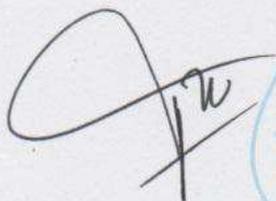
Nomor Pokok P4300216308

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **11 Januari 2019**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat



Dr. Gustiana A. Kambo, SIP., M.Si.

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



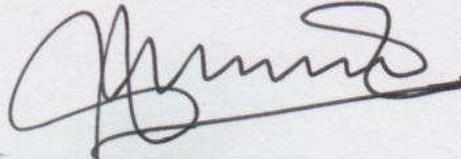
Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.



Dr. A. M. Rusli, M.Si.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWANSYAH MANSYUR

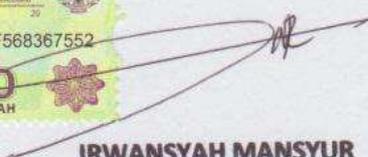
NIM : P4300216308

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Januari 2019




IRWANSYAH MANSYUR



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“RASIONALITAS ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan Strata 2 (S2) program studi ilmu politik pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, sekaligus selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.

r. Gustiana A. Kambo, M.Si, selaku dosen pembimbing 1 yang meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan pada penyusunan tesis ini serta atas ilmu yang diberikan selama



masa studi pada jurusan ilmu politik Program Magister Pascasarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Dr. Andi M. Rusli, M.Si, selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan semangat serta motivasi selama penyusunan tesis, begitupun dengan ilmu yang diberikan selama masa studi pada jurusan ilmu politik Program Magister Pascasarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Muhammad, M.Si, selaku Ketua Program studi ilmu politik dan sekaligus selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
6. Dr. Phil. Sukri, S.IP,M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan yang telah memberikan kemudahan dalam urusan Akademik, sekaligus selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
7. Bapak dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi.
8. Kedua orang tuaku H. Andi Mansyur dan Hj. Andi Nurhayati, saudara-saudaraku atas doa dan semangat yang tak pernah berhenti sehingga menjadi kekuatanku selama menyelesaikan tesis ini.
9. Istriku Tercinta Sukmawati, SE dan kedua anakku Andi Atiqah Zyafira Mawan dan Andi Mario Gau Dwi Mawan, kalianlah yang menjadi

semangat ketika penyelesaian tesis ini terasa sangat berat.

Terima kasih banyak buat baikku angkatan batch 2 TKP: Awi, Arie, Aji Nisa, Mega



Yabes, Erna, Andriani, Wijaya, Iccank, Fira, Arta, Jaya dan ovel. Mari kita selesaikan apa yang telah kita mulai bersama-sama.

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 : ica, Fate, ummi, wulan, nisa, wahyu, ricardo, rival, fikar, franz, james, paul untuk keceriaan dan kenangan serta telah menjadi bagian dalam perjalanan studiku.
12. Staf akademik Program Magister, Pascasarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atas bantuannya dalam mengurus keperluan akademik dan administrasi selama penulis melaksanakan studi.
13. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.
14. Ketua, Para Komisioner, dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah memberikan izin serta dukungan dalam saya menempuh pendidikan sampai meraih gelar Magister.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Ibarat tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Makassar, Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Konsep Orientasi Politik	15
2.2. Konsep Rasionalitas	34
2.3. Penelitian Terdahulu yang Relevan	41
2.4. Kerangka Pikir	45



BAB III

METODE PENELITIAN	46
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.3. Teknik Penentuan Informan	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data	48
3.4.1. Wawancara Mendalam	48
3.4.2. Studi Kepustakaan	50
3.4.3. Dokumentasi	51
3.4.4. Informan	51
3.5. Jenis dan Sumber Data	53
3.6. Analisa Data	54

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
4.1. Kehidupan Nelayan di Kabupaten Majene	58
4.2. Kondisi Politik di Kabupaten Majene	65
4.3. Daftar Pemilih	69

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN	73
Orientasi Politik Masyarakat nelayan di Kabupaten Majene	73
5.1 Orientasi Kognitif	74
5.3. Orientasi Afektif	86
5.3. Orientasi Evaluatif	94



PENUTUP	121
6.1. Kesimpulan	121
6.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Majene	7
Tabel 2. Daftar Nama Informan	53
Tabel 3. Jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum Tahun 2019	66
Tabel 4. Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Majene Tahun 2014	68
Tabel 5. Rekapitulasi penetapan DPT Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum Tahun 2019	71
Tabel 6. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur	112
Tabel 7. Matriks Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memilih demokrasi sebagai haluan dalam penyelenggaraanya terus berupaya untuk menjadi negara demokrasi yang ideal. Penempatan kedaulatan rakyat diatas segalanya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah menjadi prinsip dalam berdemokrasi. Demikian dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin baik nasional maupun lokal, rakyat dijamin kedaulatannya untuk memilih dan dipilih. Rakyat dalam menggunakan hak kedaulatannya tentunya juga dijamin bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan pemililihan umum yang merupakan sarana legal dalam pergantian kekuasaan. Pemilihan umum juga merupakan ruang evaluasi atas kinerja kepemimpinan selama lima tahunan oleh masyarakat. Dalam tataran praktisnya, pemilu untuk mengisi jabatan jabatan politik tertentu mulai dari legislatif maupun di eksekutif.

Keikutsertaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dapat dari lima pendekatan yakni pendekatan struktural, sosiologis,



ekologis, psikologi sosial dan pilihan rasional¹. Pendekatan struktural akan melihat kegiatan memilih sebagai produk dengan konteks yang luas seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh partai politik. Pendekatan sosial cenderung menempatkan pemilih pada konteks sosial seperti pemilih memilih karena status sosialnya, ekonomi, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, agama dan pendidikan. Pendekatan ekologis cenderung menilai karakteristik pemilih memilih dikarenakan faktor teritorial seperti desa, kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan negara. Pendekatan psikologi sosial yakni pemilih dalam menentukan pilihannya dikarenakan ada keterikatan emosional pemilih dengan partai tertentu. Dan pendekatan rasional yang mana pemilih memilih dikarenakan pertimbangan untung-rugi. Pemilih akan melakukan pertimbangan tertentu mengenai keuntungan yang diperoleh dalam memilih partai atau kandidat tertentu sehingga akan mempengaruhi keputusan memilih atau tidak dalam pemilu.

Pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih di dalam pendekatan

msikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan

urbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.145



informasi yang cukup². Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Demikian pula dengan para nelayan di Kabupaten Majene yang dalam pilihan politiknya mereka berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang mereka miliki sebagai pemilih yang mana dalam memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (*self interest*) maupun untuk kepentingan umum.

Masyarakat nelayan di Kabupaten Majene juga dalam menentukan pilihan tidaklah lepas dari pertimbangan untung dan rugi. Pilihan-pilihan yang menjadi alternatif dalam keputusan politik mereka akan dipertimbangkan pada alasan yang menjadi tujuan mereka. Kesejahteraan mereka yang rasakan masih kurang bisa menimbulkan keputusan politik yang bisa saja tidak sesuai dengan nilai normatif yang ada. Mereka akan memandang bahwa keuntungan yang mereka peroleh dari pemilihan umum hanyalah keuntungan yang spontanitas saja tanpa memikirkan manfaat pemilu guna aktivitas mereka sebagai nelayan dan bisa saja politik imbalan menjadi pilihan mereka.



vanagh, *Political Science and Political Behavior*, dalam FS Swartono, dan Ramlan 992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.146

Dalam hal Partisipasi masyarakat nelayan dalam politik bisa dilakukan dalam pemilu yaitu sebagai pemilih. Nelayan dalam suatu masyarakat akan berinteraksi dan berada dalam konteks lingkungan yang mencakup orientasi - orientasinya. Orientasi didasarkan pada keinginan dan tujuan - tujuan inilah yang kemudian membentuk pilihan - pilihan politik. Nelayan sebagai pemilih menjadi faktor penunjang terpilihnya kandidat dalam pencalonan di pemilihan umum, karena nelayan memiliki andil besar dalam elemen masyarakat dan menjadi satu komunitas pemilih yang tentunya juga memiliki hal dalam menentukan pilihan politik dan dalam menentukan pilihannya nelayan memerlukan orientasi politik.

Orientasi politik merupakan perilaku individu, sedangkan perilaku berupa kegiatan. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran individu yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih pada Pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik.³ Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih nelayan dalam memilih. tentu saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya termasuk

nelayan.

Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.141



Orientasi politik yang menurut Almond dan Verba meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif juga dapat dilihat dan diamati dari perilaku nelayan dalam kegiatan politik mereka. Nelayan dalam melaksanakan kegiatan politiknya tentunya dapat dilihat apa yang menjadi latar belakang yang membuat mereka mengambil keputusan untuk memilih. Orientasi-orientasi tersebut dapat dihubungkan dengan aspek tingkat pendidikan dan pengetahuan para nelayan yang mana ketika semakin rendah dapat diasumsikan kemampuan mereka dalam mengenal dan mengetahui tentang visi dan misi partai politik juga akan rendah.

Nelayan di Kabupaten Majene dalam aspek kemampuan mereka dalam mengetahui makna pemilihan umum sehingga membentuk orientasi politiknya sangatlah rendah. Nelayan Kabupaten Majene bukanlah masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Kehidupan mereka sedari kecil memang ditempa dengan kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan kehidupan nelayan sehingga pendidikan tidaklah menjadi prioritasnya. Hal ini berpengaruh pada tingkat pendidikan mereka yang rendah dikarenakan sekolah bukanlah menjadi prioritas mereka. Dari hal kemampuan pendidikan yang tidak memadai ini pula dapat membentuk orientasi politik para nelayan di Kabupaten Majene.

Demikian juga dengan interaksi para figur politisi yang telah
duduk di posisi anggota dewan di tingkat Kabupaten Majene. Mereka



terpilih dari hasil pemilihan umum yang juga merepakan pilihan masyarakat nelayan yang penuh dengan harapan untuk kepentingan mereka dalam aktivitasnya sebagai nelayan. Ketika mereka terpilih, yang menjadi perhatian dari para nelayan yakni pola komunikasi yang terbangun antara pihak yang memilih yakni para nelayan dan yang terpilih yakni para anggota dewan yang terpilih. Nelayan di Kabupaten Majene merasa kurangnya perhatian dan tanggapan mereka akan kondisi yang dihadapi oleh para nelayan. Aspek-aspek kehidupan nelayan yang harusnya menjadi perhatian para anggota dewan kabupaten dirasa kurang diperhatikan sehingga nelayan merasa bahwa hasil pemilihan umum kurang memberikan dampak yang baik pada kehidupan mereka.

Kondisi-kondisi seperti ini akan memberikan pengaruh kepada para nelayan terhadap orientasi politik mereka. Ketika orientasi politik ini terbangun maka perilaku memilih nelayan dalam menentukan pilihan juga akan terpengaruhi. Aspek-aspek pengalaman dari pemilihan umum yang lalu akan memberikan dampak pada pilihan politik masyarakat nelayan pada pemilihan umum yang akan datang.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi sorotan selama ini adalah partisipasi pemilih untuk hadir di Tempat Pemungutan

(TPS) untuk menyalurkan hak suaranya di bilik suara. Legitimasi sering sekali dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam



memilih. Semakin tinggi tingkat partisipasi maka ligitimasi hasil pemilu dianggap kuat dan begitu pula sebaliknya.

Kabupaten Majene dalam pelaksanaan Pemilu merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi yang sangat baik di tingkat lokal Sulawesi Barat. Dari data awal yang dihimpun setelah calon peneliti melakukan riset awal, Kabupaten Majene dari segi partisipasi pemilih mempunyai kecenderungan yang meningkat dari pemilu ke pemilu dalam hal partisipasi pemilih. Data partisipasi politik Kabupaten Majene secara spesifik di tampilkan sebagai berikut :

Tabel 1

Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Majene

Pemilu	Jumlah DPT	Partisipasi	Persentase (%)
1	2	3	4
Pemilu 2004	78.987	62.742	80,7
Pemilu 2009	92.707	73.447	82,1
Pemilu 2014	105.643	89.347	88,12

Sumber data : KPU Kabupaten Majene Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu sangat baik. Dari pemilu 2004 yang mana pemilu tersebut memilih calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Majene serta Calon Anggota DPD dengan tingkat partisipasi 80,7%. Kemudian pada Pemilu Tahun 2009 terjadi peningkatan



partisipasi pemilih pada parosentase partisipasi 82,1%. Dan pada Pemilu Tahun 2014 lonjakan partisipasi masyarakat dalam memilih sangat tinggi pada tingkat prosentase 88,12%. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat Kabupaten Majene sangatlah tinggi dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Jumlah partisipasi yang stabil tersebut bukanlah terjadi begitu saja. Peran penyelenggara Pemilu baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Majene dalam melakukan sosialisasi yang sistimatis di elemen masyarakat. Selain itu, juga dukungan dari pihak lain baik itu partai politik maupun elit lokal yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu.

Masyarakat Kabupaten Majene merupakan masyarakat pesisir yang sebagian besar bertempat tinggal di daerah pesisir pantai. Karakteristik kehidupan pesisir ini membuat masyarakat Kabupaten Majene banyak yang mengatungkan kehidupannya dengan berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat pesisir ini hanya mempunyai keterampilan dalam penangkapan ikan sehingga nelayan adalah profesi satu-satunya yang dijadikan ladang pencarian nafkah keluarga mereka.

Secara geografis, masyarakat pesisir atau nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir,

atau kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Secara sosial, mereka memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan



masyarakat lainnya, karena perbedaan karakteristik sumberdaya yang dimiliki. Kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap di laut maupun budidaya, yang hingga saat ini aksesnya masih bersifat terbuka (*open access*), sehingga kondisi lingkungan wilayah pesisir dan laut menentukan keberlanjutan kondisi sosial ekonomi mereka.

Masyarakat nelayan hampir pasti isu yang selalu muncul adalah masyarakat yang marginal, miskin dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi maupun politik. Kemiskinan yang selalu menjadi trade mark bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang.

Selain masalah sosial-ekonomi, kondisi lingkungan wilayah pesisir dan sistem mata pencaharian nelayan juga berdampak pada persoalan pendidikan dan sosial-keagamaan, terutama pendidikan keagamaan masyarakatnya. Sistem mata pencaharian masyarakat nelayan yang mengharuskan mereka berada di tengah laut untuk jangka waktu yang cukup lama, memaksa mereka untuk meninggalkan aktifitas lain selain

termasuk aktifitas pendidikan dan sosial keagamaan. Para biasanya mengajak anak-anak mereka untuk melaut, padahal



anak-anak mereka termasuk anak usia sekolah. Akibatnya, tentu saja, hak pendidikan mereka tidak terpenuhi secara maksimal. Bahkan hanya untuk memenuhi target wajib belajar sembilan tahun, program pemerintah. Inilah salah satu argumentasi yang mendasari mengapa pendidikan masyarakat nelayan rendah. Begitupun dalam melakukan aktifitas keagamaan, mereka memiliki kesempatan yang sangat terbatas. Imbasnya, pengalaman keagamaan dan pendidikan keagamaan mereka menjadi kurang memadai.

Permasalahan permasalahan tersebut merupakan kebutuhan mendasar dari para nelayan di Kabupaten Majene. Mereka membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah dan juga para legislatif yang ada di DPRD Kabupaten Majene. Masyarakat nelayan akan memberikan poin tersendiri kepada pihak politisi atau partai politik yang akan mengangkat dan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para nelayan ini. Orientasi politik para nelayan di Kabupaten Majene akan dipengaruhi oleh kemampuan partai politik dalam menyerap aspirasi para nelayan dan dapat memberi solusi akan permasalahan yang dihadapi mereka dalam beraktifitas sebagai nelayan.

Dari hasil riset awal yang dilakukan oleh peneliti pada menemukan bahwa hasil yang tidak menentu dalam penangkapan ikan mempengaruhi hubungan *Ponggawa* dan *sawi* pada keseharian nelayan

Ponggawa atau di Kabupaten Majene disebut *Juragan* dan pemilik kapal atau yang menahkodai kapal yang memiliki



kekuasaan akan kapal dan para *sawi* nya atau anak buahnya. Namun karena faktor sulitnya pendapatan dari melaut yang dirasakan oleh para nelayan menyebabkan hubungan juragan dan anak buah ini sekarang hampir tidak ada kesenjangan. Juragan tidak bisa lagi menguasai anak buahnya dalam berbagai hal dikarenakan kemampuan juragan dalam memberikan bantuan ke anak buah juga terbatas. Anak buah diberikan kebebasan oleh juragannya untuk memilih kapal lain atau juragan lain yang lebih mampu untuk melaut. Sebagai contoh, ketika anak buah dari juragan nelayan *pa'gae'* dengan kapal yang besar dan jangkauan berlayarnya jauh sulit mendapatkan tangkapan karena faktor cuaca atau arus laut sehingga nelayan *pa'gae'* ini tidak melaut maka juragan nelayan *pa'gae'* ini membolehkan anak buahnya memilih juragan *pajang* dengan kapal yang lebih kecil dan dari segi jumlah kelompok merupakan kelompok nelayan yang lebih kecil.

Permasalahan kesejahteraan ini juga mempengaruhi kemampuan nelayan dalam memiliki tanah hunian sendiri. Para nelayan bermukim di tanah yang bukan milik pribadi mereka. Mayoritas dari mereka hidup di tanah para tuan tanah yang juga merupakan para *maraddia* atau bangsawan yang memiliki lahan yang luas. Mereka ada yang menyewa lahan tersebut ada pula yang diberikan pinjaman lahan kosong tersebut.

Fenomena kehidupan nelayan yang kurang sejahtera ini ditakutkan oleh para pihak yang ingin mengambil keuntungan politik yang dapat mempengaruhi keputusan politik para nelayan. Hal ini bisa



dilakukan oleh para peserta pemilu untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat nelayan untuk memilih mereka atau calon tertentu dalam pemilu. Bagi peserta pemilu, mempengaruhi pemilih dengan iming-iming dan imbalan adalah konsekuensi logis dalam proses politik mereka. Mereka tahu bahwa imbalan dalam mempengaruhi keputusan politik seseorang adalah larangan namun mereka berkilah bahwa hal tersebut adalah biaya politik yang harus dikeluarkan. Masyarakat nelayan pun merasa bahwa keuntungan atau imbalan yang mereka dapatkan sebelum hari pencoblosan adalah hal yang lumrah sebagai pemberian calon yang sering terjadi dari pemilu ke pemilu.

Dari fenomena sosial dan politik tersebut yang peneliti dapatkan dalam observasi awal ternyata mempunyai hubungan terhadap partisipasi pemilih di TPS-TPS lingkungan nelayan menetap. Partisipasi mereka sangatlah tinggi dan ini terjadi dari pemilu ke pemilu. Nelayan akan memilih untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam momen pemilihan umum daripada mereka melaut untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Hal ini menarik dikarenakan mereka merasa bahwa bantuan kandidat yang menjadi peserta pemilihan umum yang telah duduk dalam jabatan politik belum dirasakan membantu mengangkat kesejahteraan mereka namun mereka tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Penelitian ini akan mengaitkan dengan orientasi politik dari baik

kognitif sekitar akurat atau tidaknya pengetahuan individu sistem politik yang mencakup beberapa unsur, seperti kesadaran



politik ataupun orientasi afektif dari masyarakat yaitu orientasi-orientasi perasaan terhadap politik, atau dengan kata lain, perasaan menerima atau menolak hal-hal yang bersifat politik sehingga dapat mempengaruhi sikap politik masyarakat nelayan di Kabupaten Majene. Dari uraian diatas maka penulis akan mengajukan penelitian dengan judul **“Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014”** yang mana penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran baik kepada penyelenggara pemilu sebagai sarana sosialisasi pemilu maupun bagi peserta pemilu baik nasional maupun lokal dalam pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Masyarakat nelayan dalam berpartisipasi mengikuti pemilihan umum sangatlah baik dengan ukuran tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS-TPS lingkungan nelayan. Partisipasi masyarakat nelayan tersebut bukanlah menjadi ukuran bahwa masyarakat nelayan menyalurkan partisipasinya tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat nelayan dalam menentukan keputusan politiknya. Berdasar atas hal tersebut maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut :



Bagaimana orientasi politik Masyarakat nelayan di Kabupaten Majene dari aspek Kognitif, Afektif dan Evaluatif pada Pemilihan Umum Tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan menggambarkan tentang orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif masyarakat nelayan pada pemilihan umum Tahun 2014 di Kabupaten Majene.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak yang tertarik terhadap perilaku memilih terhadap komunitas atau kelompok masyarakat;
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peserta Pemilu baik Partai Politik maupun Kandidat pemimpin nasional maupun lokal dalam melihat perilaku memilih masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah yang dapat dikomparasikan dengan penelitian ilmiah lainnya, khususnya penelitian yang mengkaji kepemiluan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan orientasi politik serta. pendekatan konsep rasionalitas Pendekatan-pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

2.1. Konsep Orientasi Politik

Orientasi politik atau cara pandang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat, orientasi politik suatu masyarakat dapat muncul dari dalam masyarakat itu sendiri atau dapat muncul dari luar masyarakat. Orientasi politik merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih nelayan dalam memilih. tentu saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya. Dalam penelitian ini, hal yang masih dalam pemikiran individu nelayan inilah yang akan dikaji lebih mendalam dalam hal memilih partai politik dan calon- calon legislatif .

Menurut Sjamsuddin, Orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan,



dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya⁴.

Ketika individu berinteraksi terhadap lingkungannya maka dapat mempengaruhi orientasi individu tersebut. Semakin kaya pengalaman dan interaksi yang individu lakukan maka akan memberikan banyak pertimbangan individu tersebut dalam melakukan keputusan pilihannya. Hal tersebut dikarenakan individu tersebut akan semakin kaya akan perbandingan-perbandingan. Hal ini didorong oleh faktor eksternal dan internal tersebut. Semakin banyak informasi yang individu dapatkan maka semakin baik pula pertimbangan yang akan dia lakukan.

Menurut Gueltom dalam Mesdiastutie, Orientasi Politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat. Sehingga dapat terbentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka yang memandang suatu objek politik⁵.

Pandangan tersebut menyatakan bahwa nilai nilai yang terbangun di lingkungan masyarakat akan menjadi pengaruh kepada individu dalam memutuskan suatu pilihan. Nilai-nilai yang terbangun dimasyarakat tentunya berbeda-beda antara suatu kumunitas satu dengan komunitas masyarakat lainnya. Masyarakat perkotaan akan beda nilai yang



in, Nazarudin. Dinamika Sistem Politik Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.
93. Hal. 8
tie, Mega. Orientasi Politik Mahasiswa Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung. FISIP
5. Hal. 15.

terbangun dengan masyarakat pedesaan. Demikian juga dengan komunitas masyarakat berpendidikan dengan masyarakat yang rendah pendidikannya serta banyak lagi komunitas lainnya. Perbedaan-perbedaan ini akan membuat pola pikir dan pola memandang suatu obyek yang sama akan berbeda dan juga akan membuat keputusan dengan obyek yang sama juga akan cenderung berbeda.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penulis memaknai bahwa orientasi politik adalah suatu cara pandang individu atau golongan masyarakat terhadap fenomena-fenomena politik yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal sehingga dapat membentuk sikap yang terpola dalam memandang suatu objek politik.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi orientasi politik. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi orientasi politik antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.



Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi politik individu aktor politik sebagai berikut⁶:

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik dan ekonomi, pendidikan dan media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dalam segala bentuknya.

Almond dan Sidney Verba menyebutkan terdapat tiga komponen orientasi politik⁷. Berikut ini adalah ketiga komponen tersebut:

- a. Orientasi Kognitif, orientasi kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen kognitif individu dapat memiliki tingkat pengetahuan tentang segala sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan. Orientasi kognitif adalah pengetahuan. Bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan



urbakti "Memahami Ilmu Politik", PT.Grasindo, Jakarta 1992. Hal; 133
Gabriel dan Sidney Verba. Budaya Politik. Jakarta: Bina Aksara, 1990. Hal;16

umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa, merupakan contoh dari orientasi kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling individu.;

- b. Orientasi Afektif, adalah perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif menyangkut aspek perasaan seorang warga negara. Individu dimungkinkan memiliki perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuat individu-individu besikap menerima atau menolak sistem tersebut. Orientasi afektif berbeda dengan orientasi kognitif, oleh sebab orientasi afektif ini bergerak di dalam konteks perasaan. Perasaan-perasaan seperti diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya, kerap lebih menentukan ketimbang faktor pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis (sifatnya populer) untuk mendongkrak aspek afektif warga negara. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai, Askeskin, Pembagian Kompor Gas, dan sejenisnya bertujuan demi mengubah orientasi afektif



warga negaranya. Tujuan akhirnya adalah, agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pimpinan politik, dan mereka akan memilih para pemberi bantuan di kemudian hari.;

- c. Orientasi Evaluatif, adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan oleh orientasi moral. Norma yang dianut oleh warga negara menjadi dasar sikap dan perilakunya terhadap sistem politik. Pengertian warga negara terhadap sistem politik merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kesadaran tentang politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan sekaligus norma-norma yang dimiliki masyarakat. Orientasi Evaluatif merupakan campuran antara orientasi kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan/tindakan. Misalnya, setelah mengetahui bahwa partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang mereka inginkan, individu memilih mereka di dalam suatu pemilu. Atau, sekelompok individu menggelar unjuk rasa untuk mendukung seorang calon yang tengah 'diserang' oleh lawan politiknya, semata-mata karena mereka merasa kenal dan sedikit tahu akan jatidiri si politisi termaksud. Orientasi Evaluatif muncul akibat adanya pengaruh dari orientasi kognitif dan afektif.



Almond dan Powell mencatat bahwa aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (*trust*) dan “permusuhan” (*hostility*).⁸ Perasaan ini dalam realitas sosial berwujud dalam kerjasama dan konflik yang merupakan dua bentuk kualitas politik. Rasa percaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok lain. Sebaliknya kelompok-kelompok yang bekerjasama memungkinkan timbulnya konflik. Dengan demikian kerjasama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan masyarakat tetapi juga merupakan ciri budaya politik.

Ketika pilihan politik dimasa lalu dirasakan menjadi pilihan yang benar dan dapat membawa kehidupan mereka menjadi lebih baik maka akan muncul rasa percaya dan akan mendorong rasa emosional yang tinggi dan kembali akan memilih mereka dalam pemilihan umum di masa yang akan datang. Tetapi jika harapan yang diinginkan tidak terpenuhi, maka akan mendorong rasa tidak puas dan kekecewaan. Mereka akan merasa tidak suka lagi bahkan muncul rasa benci. Hal ini akan menyebabkan obyek politik tersebut bukan lagi sebagai pilihan mereka pada pemilihan umum yang akan datang.

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan ketiga komponen ini tidak terpisah-pisah tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Semisal seorang warga negara dalam melakukan

... terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan

...ira, Rusadi, Sistem politik Indonesia, CV. Sinar Baru, Bandung, 1988. Hal. 44



yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya pengetahuan orang tersebut tentang sesuatu simbol politik misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Boleh jadi pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Karena hakekat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subyektif bagi politik. Karena kebudayaan politik hanya merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu kelompok masyarakat secara bulat dan utuh maka kitapun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisinya yang lain. Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik.

Orientasi politik yang muncul di masyarakat juga dapat dapat
menarik adanya perhatian dari pemilih terhadap keuntungan dan
menawarkan suatu solusi dari permasalahan yang ditawarkan oleh kandidat



atau partai politik. Semakin menguntungkan solusi yang menjadi jawaban dari suatu permasalahan di masyarakat maka cenderung pula propabilitas untuk dipilih oleh pemilih. Fiorina (1981) dalam Firmanzah mengungkapkan bahwa pemilih akan menaruh perhatian yang tinggi atas cara kontestan dalam menawarkan solusi dalam suatu permasalahan⁹. Dengan adanya pertimbangan persamaan dan keuntungan dalam pengambilan solusi yang menguntungkan pemilih maka hal ini merupakan manifestasi dari sisi rasionalitas pemilih. Sisi penilaian dan pertimbangan pemilih ini lahir dari suatu kalkulasi yang melibatkan sisi dari pengetahuan serta perasaan dari pemilih dan hal tersebut membentuk orrintasi dari pemilih tersebut.

Kemudian Gabriel A.Almond and Sidney Verba, melanjutkan bahwa Orientasi seseorang dapat dibuka secara sistematis jika memerlihatkan hal-hal berikut¹⁰:

- a. Pengetahuan apa yang di miliki seseorang tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, seperti sejarah, ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat “konstitusionalnya” dan lain-lain. Bagaimana perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini? Dan bagaimana pula pendapatnya tentang kelebihan atau kekurangan serta penilaiannya terhadap karakteristik yang sistemik itu?



h,P.Hd; 2008; Marketing Politik, Antara Pemahaman dn Realitas;Yayasan Obor
arta, Hal 101
vira, Rusadi, Sistem politik Indonesia, CV. Sinar Baru, Bandung, 1988, hal. 19-20

- b. Bagaimana pemahaman seseorang tentang struktur dan peranan, kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang diperkenalkan ke dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang bersifat “upward”? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap suatu struktur, para pemimpin dan semua proposal kebijaksanaan itu?
- c. Bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan kebijaksanaan yang “downward”, struktur-struktur, individu-individu keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal itu?
- d. Bagaimana perasaan pribadinya sebagai anggota sistem politik tersebut? Bagaimana pemahamannya tentang haknya kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang berpengaruh?. Bagaimana penilaiannya terhadap kemampuannya norma-norma partisipasi atau penampilan apa yang diketahui dan dipergunakan dalam membuat penilaian politik, atau dalam menyampaikan pendapatnya?

Kaitan antara orientasi politik dengan budaya politik dikemukakan oleh Sjamsuddin bahwa orientasi politik adalah bagian dari budaya politik



yang berkembang dimasyarakat¹¹. Budaya politik lazimnya sebagai perangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan warga negara terhadap sistem politik dan simbol-simbol. Budaya politik dianggap sama dengan konsep ideologi yang dapat berarti sikap mental, pandangan hidup, dan struktur pemikiran. Kebudayaan politik akan sangat terkait dengan struktur politik yang ada di mana budaya politik tersebut berkembang.

Budaya politik yang matang termanifestasi melalui orientasi pandangan dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis. Di sini yang dimaksud dengan budaya politik yang demokratis, menurut Almond dan Verba, adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang mendorong terwujudnya partisipasi¹². Budaya politik yang demokratis merupakan budaya politik yang partisipatif, yang diistilahkan oleh Almond dan Verba sebagai *civic culture*. Karena itu, hubungan antar budaya politik dengan demokrasi (demokratisasi) dalam konteks *civic culture* tidak dapat dipisahkan.

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, bangsa, dan negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan.

Gabriel Abraham Almond dan Sidney Verba mengatakan bahwa budaya



din, Nazarudin. Dinamika Sistem Politik Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. 93. Hal. 91

Gabriel dan Sidney Verba. Budaya Politik. Jakarta: Bina Aksara, 1990. Hal;178

politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Rusadi Sumintapura mengatakan bahwa budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Samuel Beer mengatakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dari definisi-definisi di atas tampak bahwa budaya politik menunjuk kepada orientasi dan tingkah laku individu/masyarakat terhadap sistem politik. Menurut Almond dan Powell orientasi individu terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif.

Budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Menurut Almond budaya politik dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Budaya Politik Parokial Suatu budaya politik yang mempunyai tingkat partisipasi politik sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif seperti tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik parokial menyatakan ketiadaannya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politiknya. Tidak dapat dipungkiri pada masyarakat tradisional di



Indonesia unsur-unsur budaya parokial masih ada terutama dalam masyarakat di pedalaman. Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki tugas yang khusus.

Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik tersebut menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik parokial. Demokrasi dalam budaya politik parokial hanya dapat dibangun jika terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya politik parokial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- Budaya politik ini berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana.



- Belum terlihat peran-peran politik yang khusus; peran politik dilakukan serempak bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.
- Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya cenderung rendah.
- Warga cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali yang ada di sekitarnya.
- Warga tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik tempat ia berada.

2. Budaya Politik Subyek / Kaula, Budaya politik subyek merupakan dimana masyarakat sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih relatif pasif Budaya politik subyek sering terwujud dalam masyarakat yang tidak terdapat struktur masukan yang diferensiasi.

Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman jika membicarakan masalah-masalah politik.



Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek karena tiap-tiap warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya kaula atau subjek sebagai berikut.

- Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu. Akan tetapi, frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
- Para subjek menyadari adanya otoritas pemerintah.
- Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
- Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.



3. Budaya Politik Partisipan Suatu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik secara eksplisit ditunjukkan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terdapat struktur, proses politik dan administratif.

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan. Mereka juga memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes jika terdapat praktikpraktik pemerintahan yang tidak fair. Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi karena adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Hal itu ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik warga negara yang tinggi dalam menyelesaikan sesuatu hal secara politik. Warga negara merasa memiliki peran politik. Mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik.



Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela karena adanya saling percaya (trust) antarwarga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya partisipan sebagai berikut.

- Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objekobjek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
- Bentuk kultur politik anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit. Masyarakat pun aktif terhadap sistem politik secara komprehensif. Selain itu, masyarakat juga aktif terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik).
- Anggota masyarakat bersikap partisipatif terhadap objek politik (tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi).
- Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Alfian menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat



dalam arti luas.¹³ Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama. Alfian nampaknya menempatkan faktor lingkungan budaya sebagai salah satu faktor penentu orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya.¹⁴

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak antar budaya dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik masyarakat.



masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1986, 14-245
politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1985, halaman 24

Dalam hal pemilihan umum, budaya politik diharapkan mampu mencapai tujuan dari pemilihan umum itu sendiri sesuai dengan tujuan pemilu yang dikemukakan oleh Humtingthon yaitu ¹⁵::

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan ganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.



Meymulyana, Peran pemilihan Umum Rayadalam membangun kesadaran asi mahasiswa (Tesis), Universitas Pasundan, 2016, Bandung, Hal.10

4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan

Dari hal tersebut diharapkan masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari sehingga dicapai tujuan pemilu yang mereka harapkan. Partisipasi aktif masyarakat tentunya untuk tujuan pemilu yakni untuk memilih datau menyeleksi pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif. Pemilu juga membentuk pemerintahan yang kuat, demoratis dan mendapat dukungan dari rakyat.

2.2. Konsep Rasionalitas



teratur tentang pengambilan keputusan terfokus pada apakah si
bil keputusan rasional atu tidak rasional. Padahal kata 'rasional'

itu sendiri sangatlah susah untuk dipahami. Weber mengungkapkan bahwa rasionalitas dapat dibedakan menjadi rasionalitas nilai (*Value-rational*) dengan rasionalitas tujuan (*goal-rational*).¹⁶ Rasionalitas nilai diartikan sebagai orientasi aksi berdasarkan suatu nilai apakah itu etika, moralitas, agama, hal-hal yang bersifat estetika, kesukaan dan asal-usul. Rasionalitas seseorang individu dinilai sejauh mana individu tersebut mengambil keputusan atas nilai-nilai yang dipegang bukan dari tujuan yang hendak dicapai. Rasionalitas tujuan di sisi lain, diartikan sebagai orientasi keputusan dan aksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir, metode pencapaiannya dan konsekuensinya. Individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir.

Konsep rasional weber ini menyatakan bahwa ketika individu memilih dikarenakan dorongan kepercayaan akan kebenaran terhadap suatu obyek maka disitu akan adan nilai estetika, moral, agam dan lain-lain. Individu tidak mau untuk melakukan hal hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Artinya, dalam pilihan politik, individu akan cenderung menjadikan visi dan misi serta program sebagai landasan utama dalam memilih. Dia menganggap bahwa visi dan misi serta program tersebut adalah bagian dari solusi untuk memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datan sehingga menjadi pilihan politiknya. Dia tidak mau menerima hal yang bertentangan dengan

itu baik berupa imbalan maupun menerima kecurangan lainnya



karena bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dia yakini. Hal ini merupakan orientasi nilai yang dalam mengambil keputusan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka anggap suatu kebenaran karena berlandaskan estetika, agama dan lainnya.

Tetapi jika memilih didorong oleh suatu tujuan maka factor nilai bisa juga dikesampingkan. Ketika memilih menjadi hal untuk mengamankan atau menguntungkan dirinya maka bisa saja pilihan tersebut tidak melihat faktor nilai-nilai sebagai pertimbangan. Keuntungan pribadi seperti imbalan politik, keuntungan lainnya yang menjadi alasan individu dalam memilih tanpa memandang nilai estetika dan agama lagi maka hal tersebut dikatakan sebagai rasional tujuan.

Miriam Budiarto berpendapat bahwa individu sebagai makhluk rasional ia akan selalu mempunyai tujuan-tujuan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri¹⁷. Ia akan melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya, dan arena itu dia harus membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien ia harus memilih beberapa alternatif pilihan yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal untuknya. Rasional seperti ini adalah ketika individu mengambil keputusan maka keputusan itu harus menguntungkan dirinya sendiri. Pilihan akan rasional jika pilihan tersebut menjadi hal yang akan berguna dan memberikan dampak yang baik



17. Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 93

bagi dirinya. Ketika pilihan tidak mempertimbangkan hal tersebut maka pilihan tersebut tidaklah rasional.

Evans dan Over (1996;1997) membedakan dua konsep rasionalitas¹⁸. Pertama, rasionalitas diartikan sebagai berfikir, berbicara, berargumen, mengambil keputusan dan beraksi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (R1). Rasionalitas seperti ini lebih mengedepankan alasan-alasan pribadi dalam pengambilan keputusan guna pencapaian tujuan personal. Kedua, rasionalitas diartikan sebagai berfikir, berbicara, berargumen, mengambil keputusan dan beraksi berdasarkan sebuah sistem normatif tertentu (R2). Rasionalitas seperti ini menekankan pada seberapa besar derajat kesamaan antara keputusan individu dengan *best practice* yang terdapat dan diyakini kebenarannya dalam masyarakat. Semakin sesuai keputusan individu dengan standar sosial, dia semakin dianggap rasional. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak sesuai antara apa yang ingin dicapai dan diwujudkan dengan tujuan masyarakat umumnya, individu tersebut semakin dianggap tidak rasional.

Definisi rasionalitas juga diungkapkan oleh Chater *et al* (2003). mereka membedakan rasionalitas kalkulasi dan rasionalitas deskripsi¹⁹. Rasionalitas kalkulasi didefinisikan sebagai proses berfikir yang menggunakan teknik probabilitas, logika dan proses pengambilan



h,P.Hd; 2008; Marketing Politik, Antara Pemahaman dn Realitas;Yayasan Obor
arta; Hal 93
94

keputusan. Sementara rasionalitas deskripsi diartikan sebagai derajat keputusan atau perilaku dibandingkan dengan sebuah standar hasil yang ditelurkan rasionalitas kalkulasi. Menurut Linderberg (1985), konsep rasionalitas berangkat dari konsep individu yang memiliki preferensi dan dihadapkan pada kendala (*constraints*) ketika harus mengambil keputusan²⁰. Biasanya premis dasarnya adalah bahwa individu memiliki sifat egois, penuh kalkulasi, dan bermaksud memaksimalkan utilitas. Jadi semakin seorang individu mampu memaksimalkan keuntungan dan sekaligus menekan biaya, dia dianggap semakin rasional. Sebaliknya ketika individu tidak menggunakan rumus dan perhitungan untung dan rugi dalam proses pengambilan keputusannya, oleh perspektif ini dia dicap sebagai makhluk yang sembrono dan tidak rasional.

Firmanzah berpendapat bahwa hubungan politik rasional melihat bahwa interaksi antara partai politik dengan masyarakat penuh dengan alasan-alasan logis dan rasional. Masyarakat akan menilai dan kemudian memilih partai politik dengan program kerja yang paling rasional dan logis. Partai politik melihat bahwa masyarakat adalah entitas yang rasional dan bisa berfikir sehingga partai politik akan mengimplementasikan program kerja yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat²¹.

Pendapat ini menyatakan bahwa partai politik harus bekerja nyata masyarakat. Aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat harus

94
235



diserap dan diperjuangkan sehingga partai politik bisa menjadi media solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ketika mereka bekerja secara nyata dan menyentuh masyarakat maka masyarakat akan menilai mereka sebagai pilihan yang rasional dan logis karena mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Boudon (1998) mengungkapkan bahwa dibalik keputusan dan aksi terdapat alasan-alasan yang mendasarinya²². Rasionalitas pemilih tidak dapat diukur dengan kesesuaian terhadap standar normatif yang berkembang di masyarakat. Benar atau salah keputusan tersebut ditentukan dengan seberapa jauh hal tersebut sesuai dengan nilai dasar dan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu.

Masyarakat tidak dapat dinilai dengan aturan-aturan yang menyangkut keharusan yang normatif. Ketika keputusan yang diambil oleh individu dinilai menyimpang dari norma yang ada tidaklah menjadi alasan untuk diberikan penilaian kepada individu tersebut bahwa pilihannya tidak rasional. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang pastinya ada dasarnya sehingga individu mengharapkan ada keuntungan yang diperoleh dari keputusan yang diambilnya tersebut.

Demikian juga yang dikemukakan oleh Converse (1968) bahwa keyakinan politik pada kelas masyarakat yang kurang berpendidikan secara mayoritas terfragmentasi dan *chaotic*. Dia mengemukakan bahwa

banyak kasus, keyakinan ini bukanlah dari hasil analisis yang logis



dan kalkulatif. Keyakinan tumbuh karena hasil pengalaman dan hal tersebut dipegang teguh oleh masyarakat pada umumnya. Orang dalam pengambilan keputusannya akan sulit dimintai alasan dan argument yang melatarbelakangi keyakinan tersebut. Masyarakat akan melihat bahwa keyakinan dalam mengambil keputusan tersebut adalah begitu adanya dan sulit untuk diganggu gugat dan hal tersebut adalah hal yang rasional bagi mereka.

Mencoblos di bilik TPS dilakukan secara pribadi tanpa disaksikan oleh pihak lain. Proses ini hasil dari pergulatan internal diri pemilih. Adanya aturan bebas dan rahasia menjadikan proses pencoblosan adalah persoalan individu sehingga argumentasi atau alasan masing-masing sangatlah konseptual, bisa disebabkan oleh hitung-hitungan ekonomi atau alasan yang lebih rasional. Jadi definisi rasionalitas ditentukan oleh sejauh mana si pengambil keputusan konsisten terhadap tujuan yang ingin dicapai, terlepas dengan apakah tujuannya sesuai dengan standar normatif yang ada di masyarakat atau tidak. Dalam hal ini, standar normatif masyarakat dinilai sebagai akumulasi dari standar yang dianut oleh masing-masing individu. Ketika terjadi pergeseran nilai pada diri setiap individu, keyakinan masyarakat secara umum pun berubah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan logis. Atau dapat juga dikatakan



sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing. Rasionalitas muncul ketika dihadapkan sama banyaknya suatu pilihan-pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan.

2.3. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 – Studi pada masyarakat nelayan Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan) oleh Tiara Eka Putri FISIP Univeritas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2017

Masyarakat dalam partisipasi memilihnya sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang sangat kurang di masyarakat. Para nelayan akan lebih memilih untuk tetap melaut dari pada datang untuk mencoblos pada hari Pemilu. Seberapa



banyak hasil yang dapat diperoleh sangatlah berpengaruh pada penghasilan yang mereka dapatkan guna kelangsungan hidup mereka. Penghasilan yang didapatkan dengan melaut tersebut lebih penting bagi mereka daripada berpartisipasi dalam pemilu. Dalam upaya peningkatan pengetahuan politik masyarakat nelayan, sosialisasi dan pendidikan politik telah dilakukan oleh KPU, Pemerintah daerah dan Partai Politik untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pemilihan umum namun hal ini belum berpengaruh signifikan karena pemilih nelayan cenderung apatis dan masih memilih bekerja di laut daripadamenyalurkan hak suaranya.

2. Penelitian yang berjudul Rasionalitas Masyarakat Kepulauan dalam Memilih Pemimpin – Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, oleh Rizaul Insan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015
Dalam memilih pemimpin dalam suatu masyarakat kepulauan di Desa Sepanjang, masyarakat tidak lagi memilih dikarenakan faktor kepemimpinan atau nilai kharismatik dari kandidat yang akan dipilih sebagai pemimpin. Rasionalitas masyarakat dalam memilih pemimpin dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, adanya

ncaman dan politik uang sehingga masyarakat dapat memilih kandidat tertentu. Kemudian faktor yang lain adalah dominasi



tokoh masyarakat yang biasanya disebut *Aha Bani* sangat kuat dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa rasionalitas tidak bersandar pada tujuan ideal saja melainkan juga ada kondisi yang membuat para individu tidak mempunyai kebebasan atas pilihan yang mereka pilih. Kondisi sosial tertentu dapat menjadi penjara pada rasionalitas setiap individu sehingga implikasinya adalah rasionalitas mereka menjadi terbatas.

3. Penelitian yang berjudul *Rasionalitas Memilih Masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan*, oleh Dayto Plesar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang Tahun 2011.

Penelitian ini melihat pilihan masyarakat dari pendekatan rasionalitas dalam memilih bupati dan wakil bupati yang mana sangat erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa rasionalitas masyarakat dalam memilih dilihat dari keuntungan yang diperoleh pemilih. Keuntungan ini bukanlah bersifat materi tapi berupa program yang dapat mensejahterakan masyarakat pemilih. Namun yang menghambat rasionalitas masyarakat yakni pendidikan,

ekonomian dan kurangnya pengetahuan terhadap program, kinerja pemerintah dan penyelenggara pemilukada dan visi misi



kandidat yang dapat menyulitkan pertimbangan yang rasional sehingga pilihan mereka bukanlah pilihan yang rasional.

4. Penelitian yang berjudul *Information, Election and Public Policy in a Rational Choice Perspective* oleh Valentino Larcinese *Department of Government and STICERD London School of Economics and Political Science* Tahun 2006

Menurut Valentino, Informasi akan mengambil peran penting dalam pengetahuan pemilih yang memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan. Kualitas informasi dalam sistem demokrasi mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Untuk sejumlah alasan, kandidat harus mengelolah informasi untuk pengetahuan pemilih dan juga untuk lobi ke warga negara biasa. Informasi ini akan membentuk pengetahuan pemilih dalam rasionalitas pilihan mereka dalam politik.

Penelitian terdahulu tersebut mengungkapkan bahwa dengan latar belakang pekerjaan, pendapatan dan pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Ini menjadi pembeda dalam penelitian ini dikarenakan dari riset awal ditemukan hal yang bertolak belakang dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Masyarakat nelayan dengan pekerjaan, pendapatan dan pendidikan yang rendah ternyata mempunyai partisipasi dalam memilih yang cukup tinggi.

...n sebelumnya juga tidaklah mengkaji rasionalitas masyarakat
...ut pandang orientasi politiknya.



2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dimulai dengan penggalian orientasi politik masyarakat nelayan. Dalam melihat orientasi politik ini penulis melakukan pendalaman terhadap indikator-indikator orientasi politik yang meliputi orientasi kognitif yang berupa pengetahuan dan kepercayaan mereka tentang pemilihan umum, kemudian indikator Orientasi Afektif nelayan yang menunjukkan perasaan nelayan terhadap pemilihan umum dan indikator berikutnya adalah orientasi evaluative nelayan yang ditunjukkan dengan penilaian mereka tentang hasil pemilihan umum. Dari hasil pendalaman tentang orientasi politik masyarakat nelayan dapat diidentifikasi tentang budaya politik yang dianut oleh mereka sehingga dapat menjadi latar belakang pengambilan keputusan pemilih masyarakat nelayan di Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum.

Berikut ini skema kerangka pikir penulis dari penelitian ini :

Gambar 1

Skema Kerangka Pikir

